

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (UNDP: *Human Development Report 2000:16*)

Dalam *Indonesian Human Development Report (2004:18)*, dijelaskan bahwa perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Serta kebutuhan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk pada tingkat kemiskinan. Sementara itu, selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Maka pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangatlah penting.

Selain itu, kemiskinan juga dapat menghambat masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi, serta dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki, masyarakat kurang memperhatikan lingkungan yang baik dan sehat. Dan berdasarkan sudut pandang ekonomi, hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas yang berakibat pada rendahnya pendapatan yang akan diperoleh.

Pembangunan manusia, terutama menurut UNDP, adalah proses memperoleh pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap penting yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan akses ke sumber daya yang didapat memenuhi standar hidup layak. Pilihan lain yang mungkin dianggap mendukung tiga pilihan diatas adalah kebebasan politik, hak azazi manusia, dan penghormatan hak pribadi (*personal selfrespect*). Untuk tahun 2001 ini Bappenas bekerjasama dengan UNDP mengembangkan sebuah wacana baru dengan mencoba mengukur nilai keberhasilan pembangunan manusia dihubungkan dengan manusia.

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau disebut dengan *Human Development index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil

pembangunan ekonomi, yaitu tingkat perkembangan atau pembangunan manusia. IPM (HDI) adalah suatu alat ukur yang didasarkan pada tiga indikator, yaitu indikator kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Sehingga, IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Di Indonesia ketika pada tahun 1996 diumumkan angka IPM versi BPS untuk perbandingan antar propinsi 1990-1993, mengakibatkan “Reaksi” bernada “Protes” terutama propinsi di pulau Jawa, yang dilaporkan kualitas hidup manusianya relatif “rendah” sebagaimana tercermin dalam angka IPM propinsi, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi yang terjadi selalu mengalami peningkatan. Bagaimana indeks dibuat untuk menghasilkan peringkat. Adanya peringkat lama pertumbuhan ekonomi GNP/GDP yang muncul pada dekade 60-an, mewarnai pemikiran kita dalam mengukur keberhasilan pembangunan. GDP/GRP, memang merupakan ukuran makro ekonomi yang masih dipakai oleh banyak negara, meskipun ukuran tersebut belum menggambarkan keadaan sebenarnya, terutama gambaran kualitas manusianya.

Menurut Ibnu Purna dan Adhyawarman (2009), berdasarkan data tahun 2007 sebelum terjadinya krisis keuangan global, UNDP mengumumkan peringkat

pembangunan manusia di 182 negara, dimana Norwegia tetap menempati peringkat ke-1 (dengan indeks 0.971) dan Republik Niger menempati peringkat ke-182 (dengan indeks 0.340). Sedangkan negara super-power seperti AS berada di urutan 13 (0.956), Inggris di urutan 21 (0.947), dan Jerman di urutan 22 (0.947). Sedangkan, indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia mengalami kenaikan dari 0.729 menjadi 0.734, namun tetap berada pada peringkat ke 111 dan berada dalam kategori menengah seperti tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indikator PDB per kapita (dari US\$ 3,532 menjadi US\$ 3,712) dan usia harapan hidup (dari 70,1 menjadi 70,5 tahun), sedangkan tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa dan rasio pendaftaran bersekolah tetap sama (yaitu 90% dan 68,2%). Perkembangan indeks pembangunan manusia di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 1980-2007

Tahun	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tingkat Baca-Tulis (% usia > 15)	Rasio Pendaftaran Bersekolah (%)	PDB per kapita (2007 PPP US\$)	HDI
1980	54.4	67.3	54.9	1,425	0.522
1985	58.3	67.3	62.8	1,704	0.562
1990	61.6	81.5	61.4	2,200	0.624
1995	64.4	81.5	62.5	2,970	0.658
2000	67.4	81.5	62.1	2,874	0.673
2005	69.7	92.0	67.2	3,386	0.723
2006	70.1	92.0	68.2	3,532	0.729
2007	70.5	92.0	68.2	3,712	0.734

Sumber: UNDP (2009)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tetap bernilai positif, walaupun beberapa negara mengalami dampak dari

terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008 dan berpotensi meningkatkan peringkat HDI dalam laporan tahun mendatang.

Menurut **Sampurno** (2007:75), bahwa dalam pembangunan manusia, kesehatan merupakan elemen yang sangat penting, karena berdasarkan berbagai studi dapat diketahui bahwa derajat kesehatan masyarakat suatu negara mempunyai korelasi dengan pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas yang dicapai jika derajat kesehatan masyarakat optimal sehingga memungkinkan untuk bekerja secara produktif. Dan kelemahan bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah.

Selain kesehatan, penunjang dalam pembangunan manusia lainnya adalah pendidikan. Walaupun sejak pertengahan tahun 1990-an Indonesia telah mengalami perbaikan dalam bidang pendidikan ini, namun dalam aspek kualitatif pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang sangat berarti. Dan berdasarkan hasil tes internasional menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat terendah, jauh di bawah Korea Selatan dan Hongkong.

Dari kedua elemen penting dalam pembangunan manusia di Indonesia, keduanya termasuk ke dalam indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM), sehingga kita dapat mengetahui seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan pemerintah terhadap pembangunan manusianya khususnya untuk tiap daerah dengan melihat angkat IPM antar propinsi pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Propinsi di Indonesia tahun 2005-2008

No	Propinsi	Tahun				Peringkat tahun 2008
		2005	2006	2007	2008	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	69.05	69.41	70.35	70.76	17
2.	Sumatera Utara	72.03	72.46	72.78	73.29	8
3.	Sumatera Barat	71.19	71.65	72.23	72.96	9
4.	Riau	73.63	73.81	74.63	75.09	3
5.	Jambi	70.95	71.29	71.46	71.99	13
6.	Sumatera Selatan	70.23	71.09	71.4	72.05	12
7.	Bengkulu	71.09	71.28	71.57	72.14	11
8.	Lampung	68.85	69.38	69.78	70.3	20
9.	Bangka Belitung	70.68	71.18	71.62	72.19	10
10.	DKI Jakarta	76.07	76.33	76.59	77.03	1
11.	Jawa Barat	69.93	70.32	70.71	71.12	15
12.	Jawa Tengah	69.78	70.25	70.92	71.6	14
13.	Yogyakarta	73.5	73.7	74.15	74.88	4
14.	Jawa Timur	68.42	69.18	69.78	70.38	18
15.	Banten	68.8	69.11	69.29	69.7	23
16.	Bali	69.78	70.07	70.53	70.98	16
17.	Nusa Tenggara Barat	62.42	63.04	63.71	64.12	32
18.	Nusa Tenggara Timur	63.59	64.83	65.36	66.15	31
19.	Kalimantan Barat	66.2	67.08	67.53	68.17	29
20.	Kalimantan Tengah	73.22	73.4	73.49	73.88	7
21.	Kalimantan Selatan	67.44	67.75	68.01	68.72	26
22.	Kalimantan Timur	72.94	73.26	73.77	74.52	5
23.	Sulawesi Utara	74.21	74.37	74.68	75.16	2
24.	Sulawesi Tengah	68.47	68.85	69.34	70.09	22
25.	Sulawesi Selatan	68.06	68.81	69.62	70.22	21
26.	Sulawesi Tenggara	67.52	67.8	68.32	69	25
27.	Gorontalo	67.46	68.01	68.83	69.29	24
28.	Maluku	69.24	69.69	69.96	70.38	19
29.	Maluku Utara	66.95	67.51	67.82	68.18	28
30.	Papua	62.08	62.75	63.41	64	33
Indonesia		69.57	70.10	70.59	71.17	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (BPS) (data diolah)

Dari Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa angka IPM yang dicapai oleh setiap propinsi berfluktuatif, karena potensi tiap propinsi berbeda sehingga angka IPM yang dicapai pun berbeda khususnya kualitas sumber daya manusia yang merupakan indikator penentu IPM. Misalnya DKI Jakarta selama periode

penelitian, setiap tahunnya angka IPM yang dicapai selalu mengalami kenaikan namun berdasarkan fakta pada pembangunan manusianya belum merata karena masih banyak orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang layak. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota tanpa keterampilan atau keahlian yang dimiliki, sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan keahlian yang dibutuhkan di kota yang berbeda dengan di desa. Tetapi, karena DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi negara ini dan salah satu penentu IPM adalah pendapatan per kapita, maka ketika Jakarta memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan mengakibatkan angka IPM yang selalu meningkat walaupun masih ada penduduk di kota Jakarta yang belum sejahtera. Dan jika dilihat berdasarkan laporan BPS peringkat IPM, pada tahun 2008 untuk propinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama dan peringkat terakhir atau ke 33 adalah propinsi Papua.

Selain itu, masalah yang terjadi terkait dengan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Lanjouw, dan kawan-kawan, 2001 dalam **Charisma**, 2008:30).

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa pembangunan manusia antar propinsi di Indonesia mengalami masalah karena kebijakan yang telah pemerintah terapkan belum efektif dan di tingkat dunia untuk pun kita masih berada pada

peringkat 111, dan perbandingan dengan negara-negara anggota ASEAN untuk tahun 2009 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Nilai dan Peringkat IPM dan GDP/Kapita Negara-negara ASEAN Tahun 2009

NO	Asia Tenggara	Peringkat	IPM	Peringkat	GDP
1.	Singapura	23	0.944	23	34.346
2.	Brunei Darussalam	30	0.920	20	36.681
3.	Malaysia	66	0.829	20	7.649
4.	Thailand	87	0.783	91	3.973
5.	Philipina	105	0.751	121	1.721
6.	Indonesia	111	0.734	116	2.224
7.	Vietnam	116	0.725	137	1.052
8.	Laos	133	0.619	144	897
9.	Kamboja	137	0.593	148	782
10.	Myanmar	138	0.586	166	442

Sumber: UNDP, Wikipedia

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, IPM Indonesia sebesar 0.734 menduduki peringkat ke 111 di dunia setelah Philipina, dan Singapura yang menempati urutan pertama dengan IPM 0.944 untuk negara-negara di Asia Tenggara sedangkan urutan yang terakhir yaitu Myanmar dengan IPM sebesar 0.586. Berdasarkan data dari IMF (*International Monerary Fund*) pada tahun 2009, GDP tertinggi untuk wilayah Asia Tenggara di tempati oleh Brunei Darussalam sebesar US\$ 36.681 pada peringkat 20 dan Myanmar menempati posisi terakhir untuk Asia Tenggara sebesar US\$ 442, sedangkan Indonesia menempati posisi 116 dengan GDP sebesar US\$ 2.224.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA (Berdasarkan Data Panel di Indonesia tahun 2005-2008)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pendidikan berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi kesehatan berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia?
5. Apakah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk miskin terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia

3. Untuk pengaruh pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pendidikan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia
4. Untuk pengaruh pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi kesehatan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk miskin terhadap pembangunan manusia di Indonesia
- 2) Memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah pembangunan manusia di Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya mahasiswa untuk melakukan penelitian tindak lanjut mengenai pembangunan manusia di Indonesia.